



## **Strategi Layanan Bimbingan Dan Konseling Di Forum Komunikasi Disabilitas Kudus (FKDK)**

**Amara Zulfa El Husna<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>IAIN Kudus, Indonesia

[amarazulfa23@gmail.com](mailto:amarazulfa23@gmail.com)

### **Abstrak**

Disabilitas atau difabel merupakan pengindonesianan dari akronim “differently able people”, yakni diff-able. Maknanya adalah orang yang mampu dengan cara yang berbeda. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi layanan bimbingan dan konseling di Forum Komunikasi Disabilitas Kudus (FKDK). Peneliti berfokus pada layanan bimbingan dan konseling dengan menggali secara dalam dari kasus yang ada di lokasi penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan fokus berdasarkan teori strategi pemberdayaan yaitu: layanan dasar, layanan responsive, dan layanan kolaborasi. Setiap manusia yang lahir tidak serupa ada yang normal dan bahkan ada yang tidak normal. Salah satunya adalah disabilitas. Penyandang disabilitas itu sendiri merupakan cacat fisik dan mental yang dialami seseorang karena ketidak sempurnaan perkembangan otak. Akibatnya banyak sekali sisi negatif yang mereka rasakan dari pencemoohan, dikucilkan, diasingkan, dihina, dilecehkan dan lain sebagainya. Penyandang disabilitas juga merupakan ciptaan Tuhan sehingga dalam kehidupannya, mereka berhak mendapat kehidupan dan pekerjaan yang layak. Maka dari itu sangat penting sekali peran pemerintah dalam memberikan perhatian lebih guna kelangsungan hidup mereka dari Pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.

**Kata Kunci :** Strategi Bimbingan dan Konseling, Disabilitas, Difabel

### **Abstract**

*Disability or disability is an Indonesianization of the acronym "differently able people", namely diff-able. The meaning is a person who is capable in different ways. The aim of this research is to determine the strategy for guidance and counseling services at the Kudus Disability Communication Forum (FKDK). Researchers focused on guidance and counseling services by digging deeply into the cases at the research location. This research is descriptive qualitative with a focus based on empowerment strategy theory, namely: basic services, responsive services, and collaborative services. Every human being is born differently, some are normal and some are even abnormal. One of them is disability. Disability itself is a physical and mental disability experienced by a person due to imperfect brain development. As a result, they experience a lot of negative aspects from being ridiculed, ostracized, isolated, insulted, harassed and so on. People with disabilities are also God's*

*creation so in their lives, they have the right to a decent life and work. Therefore, the role of the government is very important in paying more attention to their survival in terms of education, health and so on.*

**Keywords:** *Strategy Guidance Counseling, Disability, Different Ability*

## **Pendahuluan**

Semua manusia diciptakan oleh Allah SWT, dan masing-masing memiliki tempat dan martabat yang sama di Bumi. Penyandang disabilitas tidak seharusnya menderita karena kurangnya hormat atau martabat karena ketidaksempurnaan mereka. Namun, penyandang disabilitas seringkali merupakan kelompok yang paling terpinggirkan dan berisiko dalam interaksi sosial (Priamsari, 2019). Karena disabilitas merupakan kejadian umum dan merupakan bagian dari kondisi manusia, masyarakat secara keseluruhan harus cukup "familiar" dengan masalah tersebut. Hampir setiap orang pernah mengalami disabilitas pada suatu saat dalam hidup mereka. Kemampuan fisik dan sosial individu yang berumur panjang lebih rentan. Sebagian besar keluarga besar memiliki setidaknya satu orang yang memiliki disabilitas. Di sisi lain, banyak orang yang tidak memiliki disabilitas memiliki teman, keluarga, atau kenalan yang memiliki disabilitas. (Malta: WHO and The World Bank, 2011)

Penyandang disabilitas berbeda dari orang lain karena keterbatasan fisik dan mental. Karena itu, penyandang disabilitas harus diberikan perhatian khusus untuk meningkatkan kemampuan mereka sesuai dengan kekurangan mereka. Jika mereka ingin menjadi bagian dari masyarakat yang produktif, penyandang disabilitas harus dapat menyesuaikan diri dengan berbagai aspek kehidupan modern yang semakin maju. Mereka harus berusaha melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan nilai diri mereka sehingga mereka dapat memberikan hasil yang baik bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. (Almunawaroh, dkk, 2022). Persepsi buruk terhadap disabilitas dan orang-orang yang hidup dengan disabilitas disebabkan oleh gagasan tentang keadaan normal yang mendominasi pemikiran masyarakat. Menurut Widinarsih (2019), orang yang memiliki karakteristik fisik atau penampilan yang dianggap "berbeda" dari apa yang dianggap normatif atau tipikal masyarakat dianggap tidak diinginkan dan tidak layak untuk tinggal di komunitas tersebut. Kristiandy (2021) menyatakan bahwa, karena penyandang disabilitas sering disebut sebagai orang cacat dalam bahasa sehari-hari mereka, kehidupan mereka berbeda dari masyarakat umum. Orang-orang dalam masyarakat seringkali menyalahgunakan hak-hak mereka, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak asasi manusia (HAM) bagi individu penyandang disabilitas, terminologi yang digunakan untuk menggambarkan mereka telah berkembang dan berubah. Saat orang dengan ketunaan disebutkan, istilah "cacat" dianggap tidak pantas. Ketika seseorang menyebut orang dengan ketunaan, mereka dianggap tidak sopan (Santoso, 2017). Disabilitas adalah kelainan atau kekurangan fisik, sensorik, atau mental (medis) yang dimiliki seseorang yang membuatnya tidak dapat berfungsi secara sosial. Akibatnya, seseorang disebut sebagai kelainan sosial atau deviant sosial. Menurut Thohari (2014).

Goffman menggambarkan penyandang disabilitas sebagai individu yang serba terbatas yang tidak dapat berkomunikasi dengan orang lain. (Allo, 2022).

Penyandang disabilitas adalah salah satu komponen minoritas masyarakat yang dijamin oleh undang-undang untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016, Pasal 5 jelas menyatakan bahwa hak pendidikan adalah hak yang harus diberikan kepada penyandang disabilitas. Artinya, negara bertanggung jawab atas hak penyandang disabilitas untuk menerima pendidikan yang layak (Saputra, B. R., 2019). Dengan demikian, banyak komunitas disabilitas sekarang berusaha untuk mengajarkan keterampilan kepada anggota mereka yang disabilitas. Begitu pula dengan Forum Komunikasi Disabilitas Kudus (FKDK), sebuah komunitas yang terdiri dari para penyandang disabilitas yang berusaha untuk memajukan kesejahteraan para penyandang disabilitas di Kudus sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang inklusif. Keterbatasan tidak boleh menghalangi seseorang untuk maju. (Rahmawati, 2022).

Bimbingan Konseling adalah komponen penting yang membantu pelaksanaan pendidikan bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas dengan karakteristik unik mungkin menghadapi banyak masalah dan kesulitan saat belajar. Oleh karena itu, BK sangat penting untuk membantu penyandang disabilitas mengatasi masalah ini (Hussain & Maarof, 2017). Tujuan bimbingan dan konseling adalah untuk meningkatkan potensi individu seoptimal mungkin agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik di sekolah, keluarga, maupun masyarakat (Bastomi, 2020), termasuk penyandang disabilitas. Bimbingan konseling dapat digunakan di lingkungan yang menerima penyandang disabilitas. Abdillah, H. mengatakan bahwa Model Pelaksanaan Bimbingan Konseling Komputer dan TI untuk Siswa Berkebutuhan Khusus dapat diterapkan. Sebagai bagian dari sistem pendidikan, bimbingan konseling bertujuan untuk mendukung proses pembelajaran siswa berkebutuhan khusus agar mereka dapat belajar dengan lebih baik. Bimbingan dan Konseling dapat digunakan untuk Siswa Tunarungu. (Pratiwi et al., 2023). menjadi lebih baik (Putri & Prihwanto, 2021). Untuk Meningkatkan Kemampuan Difabel Netra, Layanan Bimbingan dan Konseling dapat digunakan.

Untuk membantu penyandang disabilitas, penelitian ini akan mempelajari metode bimbingan dan konseling yang paling efektif. Penelitian ini penting dilakukan karena bantuan berupa bimbingan dan konseling membantu mereka bangkit dari keterpurukan dan kembali memiliki semangat untuk menjalani kehidupan.

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, metode penelitian kualitatif digunakan. Penelitian kualitatif adalah strategi penelitian inquiry (menemukan dan memecahkan masalah) yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, dan deskripsi fenomena, fokus, dan multimetode. Ini adalah penelitian yang alami dan holistik, mengutamakan kualitas, dan disajikan secara naratif dengan berbagai cara (Yusuf, 2014). dimana peneliti mengumpulkan data langsung di lokasi Penelitian ini memilih Forum Komunikasi Disabilitas Kudus (FKDK) karena informasinya cukup.

Metode ini diimplementasikan menggunakan model studi kasus. Dengan mempelajari kasus-kasus yang ada di lokasi penelitian, peneliti berkonsentrasi pada pendekatan untuk layanan bimbingan dan konseling. Meskipun peneliti mendapatkan data melalui wawancara mendalam, pengamatan dan studi dokumentasi juga penting, karena triangulasi data digunakan. Dalam penelitian, alat analisis data yang digunakan menggunakan Miles dan Huberman, yang berarti mengumpulkan data, mengurangnya, dan menampilkannya sebelum diverifikasi atau disimpulkan. (Sugiyono, 2015).

## **Hasil Dan Pembahasan**

Teknik yang digunakan untuk mempersiapkan dan melaksanakan program terkait erat dengan keberhasilannya. Kajian yang menjelaskan proses pemberdayaan diperlukan untuk menentukan apakah program tersebut sejalan dengan rencana pemberdayaan masyarakat atau sebaliknya. Menurut Syarief et al. (2022), strategi adalah kumpulan tindakan yang mengarah pada pembuatan dan pelaksanaan rencana dengan tujuan mencapai tujuan organisasi.

FKDK didirikan karena kehidupan warga difabel terus dimarjinalkan secara struktural dan kultural. Tidak pernah ada cara yang adil untuk melindungi hak-hak difabel, seperti hak pendidikan, pekerjaan, kesehatan, jaminan sosial, perlindungan hukum, dan akses ke informasi dan komunikasi sampai pada penggunaan fasilitas publik. Dengan kata lain, orang difabel telah didiskriminasi. Menurut FKDK, karena manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna, mereka memiliki hak yang sama untuk mengembangkan potensi diri mereka sendiri untuk hidup dengan baik. Oleh karena itu, tidak sepatutnya jika ada individu di dunia ini yang tersisihkan dari lingkungan sosialnya hanya karena keadaan yang berbeda. Dengan jaringannya, Program FKDK bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang menempatkan semua orang dalam kesejajaran sehingga tidak ada lagi yang tersisihkan. FKDK menolak untuk menggunakan istilah penyandang cacat karena dalam budaya Indonesia, istilah itu sangat merendahkan derajat manusia dan anti kesetaraan. FKDK membuat keputusan untuk menggunakan istilah "difabel", yang dianggap lebih adil dan mengangkat martabat manusia.

Forum Komunikasi Disabilitas Kudus (FKDK) adalah organisasi non-pemerintah yang tidak berafiliasi dengan pemerintah, nirlaba, dan tidak berafiliasi dengan suatu organisasi politik. FKDK pertama kali didirikan di Kudus pada 20 November 2014. Organisasi ini berkomitmen untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak difabel di Indonesia dan Kabupaten Kudus untuk mewujudkan kehidupan yang setara dan inklusif. (Wawancara dengan direktur FKDK). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis strategi layanan bimbingan dan konseling di Forum Komunikasi Disabilitas Kudus (FKDK).

### **Layanan Dasar**

Di Forum Komunikasi Disabilitas Kudus (FKDK) sendiri berdasarkan wawancara dengan Ketua FKDK "bentuk dari layanan dasar yaitu pihak FKDK berusaha sekuat tenaga memberdayakan teman-teman disabilitas seperti membekali teman-teman disabilitas berupa membuat kerajinan, bubuk herbal, dan lain lain serta

di jual di marketplace. Jika ada kegiatan seperti Kudus expo, FKDK selalu mengikuti kegiatan tersebut dan FKDK juga mengadakan konseling dan edukasi kepada teman-teman disabilitas”. Proses pemberian dukungan kepada seluruh siswa atau konseli dalam mengembangkan sikap, pengetahuan, dan kemampuan dalam bidang pengembangan pribadi, sosial, akademik, dan karir serta penjelasan tugas perkembangannya disebut dengan pelayanan dasar. Bimbingan kelompok, bimbingan klasikal, dan bimbingan lintas kelas merupakan contoh layanan dasar yang ditawarkan langsung kepada siswa atau konseli. Papan bimbingan, pamflet, dan media bimbingan dan konseling yang kreatif merupakan contoh kegiatan yang dilakukan melalui media. (Setiowati, 2020).

Layanan dasar, menurut Subekti & Astuti (2012), adalah bantuan yang diberikan oleh konselor sekolah kepada setiap siswa dalam upaya membantu perkembangan mereka secara optimal. Bantuan kepada seluruh konseli dirancang dan dilaksanakan secara sistematis untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri sesuai dengan tahap dan tugas perkembangan. Ini dikenal sebagai layanan dasar. Bimbingan klasik, informasi, orientasi, bimbingan kelompok, dan pengumpulan data (aplikasi alat) adalah beberapa contoh aktivitas yang dapat dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling. (Octavia, 2019)

### **Layanan Responsif**

Berdasarkan wawancara dengan Bendahara FKDK “Pihak FKDK memberikan layanan responsif sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan penyandang disabilitas diantaranya memberi bantuan berupa tongkat karna harga yang mumpuni, Jika seperti kaki palsu atau tangan palsu pihak FKDK belum mumpuni. Mengajukan permohonan beberapa kaki palsu ke pihak BASNAS Kabupaten Kudus yang di buat langsung di Mojokerto karna adanya kualitas yg bagus. Selain dari bantuan berupa alat, pihak FKDK siap siaga membantu teman-teman disabilitas yang seperti pernah ada kasus anggota FKDK terjerat kasus penipuan, pihak FKDK siap mendampingi dan mempunyai relawan sebagai lawyer. Jika ada anggota keluarga teman-teman disabilitas yg sakit itu pihak FKDK juga siap siaga membantu. Jadi terdapat suasana kekeluargaan yang sangat erat satu sama lain. Hal ini sesuai dengan Susila (2019) menjelaskan bahwa konseling adalah proses interaksi antara konselor dengan konseli secara privat dalam rangka membantu konseli memperoleh pemecahan dari permasalahan yang dihadapinya dengan cara mengubah perilaku-perilaku tertentu pada dirinya

Proses memberikan bantuan kepada individu yang membutuhkan bantuan untuk mencapai kemandirian dikenal sebagai layanan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, responsif berarti menanggapi dengan cepat, tergugah hati, dan memberi tanggapan. Layanan responsif didefinisikan oleh Departemen Pendidikan (2007) sebagai memenuhi kebutuhan jangka pendek siswa atau masalah yang mereka hadapi yang berasal dari lingkungan pribadi, sosial, belajar, dan pekerjaan mereka. Layanan responsif berarti memberikan bantuan kepada konseling yang mengalami masalah atau dalam situasi yang membutuhkan bantuan segera, karena tidak mendapatkan bantuan akan mengalami kesulitan dalam proses mencapai tugas perkembangannya. Layanan resp onsiif didefinisikan sebagai "layanan bantuan bagi siswa yang memiliki kebutuhan atau masalah yang memerlukan pertolongan segera." Yusuf, tahun 2010.

Menurut Achmad Juntika Nurihsan (2017), Landasan Bimbingan (Jakarta, Pustaka Setia, 2010) adalah layanan bimbingan responsif yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik saat ini. Layanan responsif bertujuan untuk membantu siswa yang memiliki kebutuhan atau masalah yang memerlukan bantuan segera (pertolongan). Layanan ini bertujuan untuk membantu siswa yang saat ini mengalami kebutuhan atau kesulitan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang semakin berkembang.

### **Layanan Kolaborasi**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris FKDK “pihak FKDK bekerja sama dengan BASNAS Kabupaten Kudus untuk kaki palsu dan untuk memperoleh kaki palsu, temen-temen disabilitas tidak di pungut biaya sama sekali. FKDK juga bekerjasama dengan LAZISMU dan ada beberapa CSR dari perusahaan seperti djarum dan sukun yang biasa diajak kerja sama oleh pihak FKDK. Di setiap tahun, FKDK mendapat bantuan dari dinas Kabupaten Kudus dengan uang sebesar 40 juta. Pak Rismawan mengatakan, Uang tersebut biasanya dikasihkan beberapa untuk anggota untuk peningkatan usaha bagi yang mempunyai usaha dan lebih maju lagi. tetapi pak rismawan berkata, dinsos itu sebagai pembina bukan sebagai pihak kerja sama. Hal ini sesuai dengan (Setiowati, 2020) dalam rangka mengembangkan dan melaksanakan program layanan bimbingan dan konseling, instruktur atau konselor bimbingan dan konseling melakukan kerjasama interaktif dengan pihak lain (orang tua, guru mata pelajaran, spesialis lain, dan lembaga). Pihak-pihak tersebut dapat memberikan ide dan/atau tenaga. Kerja sama ini dicapai melalui komunikasi terus-menerus dan berbagi ide, konsep, dan/atau energi. Suatu kegiatan yang diselesaikan oleh seorang guru, orang tua, atau ahli lainnya bernilai satu jam pelajaran, namun suatu kegiatan yang diselesaikan oleh suatu lembaga bernilai dua jam pelajaran.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan layanan bimbingan dan konseling. Pertama, bersifat pengembangan, hal ini berarti layanan bimbingan dan konseling hendaknya mengembangkan aspek perkembangan peserta didik, mulai dari pribadi, sosial, belajar dan karir. Bowers & Hatch (Rahman, 2012). Kedua bersifat preventif, layanan yang bersifat preventif ini berarti layanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan hendaknya dapat mengantisipasi sejak dini perilaku malasuai dari pribadi konseli. Membangun program BK yang ada dalam memenuhi kebutuhan peserta didik sebagaimana sifat layanan yakni preventif dan pengembangan dengan mengacu kebutuhan peserta didik yang ada, membawa konselor di sekolah untuk memenuhi langkah dalam perencanaan program yang ada sehingga layanan yang diberikan dapat sesuai dengan kebutuhan konseli. Adapun layanan bimbingan dan konseling di sekolah sebagaimana berikut ini, komprehensif adalah perencanaan, pengorganisasian, penerapan, dan evaluasi. (Schmidt, 2008).

Layanan yang diberikan oleh guru bimbingan dan konseling mengacu pada tugas perkembangan, pengembangan potensi, dan pengentasan masalah peserta didik. (Kartadinata, 2007). Panduan operasional penyelenggaraan bimbingan dan konseling menjelaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan layanan bimbingan konseling dapat dicapai oleh guru bimbingan dan konseling melalui kolaborasi dengan pemangku kepentingan lain seperti guru bidang studi, wali kelas, komite sekolah, orang tua, dan pihak-pihak lain yang relevan (Farozin dkk, 2016). Kolaborasi yang dilakukan oleh

guru bimbingan dan konseling merupakan salah satu kompetensi sosial dari seorang guru bimbingan dan konseling.

Kolaborasi adalah bentuk kerja sama, interaksi, dan kompromi beberapa elemen yang terkait, baik individu, lembaga, atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang menerima manfaat dan hasil. Kolaborasi didasarkan pada prinsip-prinsip berikut: tujuan yang sama, persepsi yang sama, kemauan untuk berproses, kejujuran, kasih sayang, dan berbasis masyarakat. Interaksi berkesinambungan antara beberapa orang dikenal sebagai kolaborasi. Kolaborasi didefinisikan sebagai proses berpikir di mana orang-orang berpikir tentang aspek-aspek yang berbeda dari suatu masalah untuk menemukan solusi dari perbedaan tersebut dan membatasi perspektif mereka tentang apa yang dapat dilakukan (Ramdani, dkk., 2020).

Penggunaan istilah kolaboratif berasal bahasa Inggris yaitu collaborative yang berarti bekerja sama atau collaboration yang berarti kerja sama. Istilah kolaboratif dalam ilmu konseling dan psikoterapi menurut Bertolino & O'Hanlon (2002) terjadi dalam perkembangan yang cukup panjang, dengan menguraikan perkembangan pola layanan bimbingan dan konseling kolaboratif ke dalam tiga pola, yakni pola acuan yang memfokuskan pada fisik, patologi dan pengalaman masa lalu yang didominasi oleh teori psikoanalisa, psikodinamik dan psikiatri biologis dengan didasari patologi, pola layanan yang mengubah pandangan dari intrafisik dan tindakan masa lalu menuju tindakan masa kini, pola layanan yang berbasis kolaboratif. Konselor dan pihak yang bekerja sama harus saling memahami, sehingga tercapai suatu tujuan yang telah direncanakan. Selain itu dijelaskan bahwasanya kolaborasi tercapai apabila saling profesional antara konselor dan pihak yang terkait, ditunjang dengan manajemen yang (Winarno, 2009). Koordinasi dan kolaborasi mempunyai tujuan agar menyelesaikan masalah secara efektif diantaranya memberikan dukungan khusus kepada siswa yang mempunyai kebutuhan khusus dan selalu mendukung pengembangan diri siswa sehingga terhindar dari kekerasan yang (Barr & Parrett, 2011).

## **Penutup**

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam artikel kesimpulan penulisan artikel ini bahwa strategi adalah serangkaian kegiatan yang berujung pada penciptaan dan pelaksanaan rencana yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi. Suharto (2017: 58) mendefinisikan pemberdayaan sebagai inisiatif yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada individu atau kelompok individu yang kurang beruntung dan rentan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dengan kekuatan dan kapasitas. Disabilitas adalah kelainan atau kekurangan fisik, indra atau mental (medis) yang dimiliki seseorang yang menjadikan orang tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya dalam masyarakat, sehingga mereka disebut disebut sebagai orang yang mempunyai kelainan sosial atau social deviant.

Strategi Layanan Bimbingan Dan Konseling Di Forum Komunikasi Disabilitas Kudus (FKDK) yang diukur dengan 3 (tiga) layanan bimbingan dan konseling cukup berhasil dalam layanan bimbingan dan konseling. Beberapa fokus penelitian telah tercapai dengan baik dan telah sesuai dengan teori strategi layanan

bimbingan dan konseling menurut jurnal yang dikutip Arum. Hal tersebut dibuktikan dengan strategi layanan bimbingan dan konseling pada layanan dasar, layanan responsif, dan layanan kolaborasi. Strategi layanan bimbingan dan konseling ditandai dengan adanya pembekalan seperti kerajinan. Karenanya, anggota pada Forum Komunikasi Disabilitas Kudus (FKDK) dapat menambah penghasilan. Selanjutnya, strategi layanan bimbingan dan konseling pada layanan responsif, ditandai dengan cukup membantu mereka memperoleh alat bantu sekaligus dengan adanya FKDK tujuan utamanya untuk memberdayakan teman-teman disabilitas. Strategi layanan bimbingan dan konseling yang terakhir adalah layanan kolaborasi. Dengan adanya kolaborasi atau kerja sama antar lembaga atau komunitas, cukup membantu Forum Komunikasi Disabilitas Kudus dalam hal finansial maupun material demi kesejahteraan FKDK.

### Daftar Pustaka

- Abdillah, H. (2022). Model Pelaksanaan Bimbingan Konseling Berbasis Teknologi Informasi dan Komputer Bagi Siswa Berkebutuhan Khusus. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2(6), 792-801.
- Achmad Juntika Nurihsan (2017). *Strategi Layanan Bimbingan dan Konseling*. Bandung, PT Refika Aditama
- Allo, Ebenhaezer Alsih Taruk. (2022). Penyandang Disabilitas Di Indonesia dalam *Penyandang Disabilitas Di Indonesia*, 9(2), 808.
- Almunawaroh, Nurullita, dkk. (2022). Strategi Pendidikan Islam Dalam Mengatasi Problematika Penyandang Disabilitas dalam *Jurnal Sustainable*, 5(2), 398-399.
- Barr, R., & Parrett, W. (2011). The kids left behind: Catching up the underachieving children of poverty.
- Bastomi, H. (2020). Pemetaan Masalah Belajar Siswa SMK Negeri 3 Yogyakarta Dan Penyelesaiannya (Tinjauan Srata Kelas). *KONSELING EDUKASI : Journal Of Guidance And Counseling*, 4 No. 1
- Bertolino, B. & O'Hanlon, W.H. (2002). Collaborative, competency-based counseling and therapy. Boston: Allyn and Bacon
- Cahyaningtias, Sari, dkk. (2019). Analisis Keterkontrolan Model Penyebaran Virus Polio Tipe Vaccine-Derived Polio Virus (VDPV) dan Wild Polio Virus (WPV) dalam *Jurnal UJMC*, 5(1), 36.
- Depdiknas (2007). *Rambu-Rambu Penyelenggaraan Bimbingan Dan Konseling Dalam Jalur Pendidikan Formal*, Jakarta: Pustaka Setia
- Hussain, Y., & Maarof, M. (2017). Reorientation of Special Education in Improving Self Help of Children with Special Need. *Journal of ICSAR*, 1(1), 85–90
- Kristiandy, F. (2021). Analisis Kesejahteraan Hak Penyandang Disabilitas: Situasi, Kondisi, Permasalahan Dan Solusi Penyandang Disabilitas Di Lingkungan Sekitar Dan Lembaga Pemasarakatan. *Widya Yuridika*, 4(1), 125-134.
- Muh Farozin and dkk (2016). Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan Dan Konseling Sekolah Dasar (Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan).
- Ndaumanu, Frichy. (2020). Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah dalam *Jurnal HAM*, 11(1), 133.

- Octavia, S. A. (2019). *Implementasi Manajemen Bimbingan Konseling di Sekolah/Madrasah*. Deepublish.
- Pratiwi, S. C. I., Nurmasya, R. E., Rusdi, D. A., & Fazny, B. Y. (2023, July). Bimbingan dan Konseling Belajar Pada Siswa Disabilitas Tunarungu di Sekolah Luar Biasa Darma Asih Pontianak. In *Proceedings of Annual Guidance and Counseling Academic Forum* (pp. 138-143).
- Priamsari, RR. (2019). Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas dalam *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 48, (2), 215.
- Putri, D. R., & Prihwanto, P. (2021). Metode Layanan Bimbingan Dan Konseling Untuk Membangun Kompetensi Difabel Netra. *JURKAM: Jurnal Konseling Andi Matappa*, 5(1), 1-8.
- Rachman, Fathur. 2012. *Manajemen dan Pengembangan Program Layanan Bimbingan dan Konseling*. Yogyakarta: Modul Pelatihan Guru BK Yogyakarta
- Rahmawati, H. K. (2022). Optimalisasi Bimbingan Karir Dalam Proses Pengembangan Diri Penyandang Disabilitas Di Forum Komunikasi Disabilitas Kudus. *Konseling Edukasi: Journal Of Guidance and Counseling*, 6(1), 55-74.
- Ramdani, R., Nasution, A. P., Ramanda, P., Sagita, D. D., & Yanizon, A. (2020). Strategi kolaborasi dalam manajemen pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. *Educational Guidance and Counseling Development Journal*, 3(1), 1-7.
- Rofi'ah Inggil, Pangestu. (2022). Strategi Pemberdayaan Program Karepe Dimesemi Bojo Pada Penyandang Disabilitas Mental dalam *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(3), 231-232.
- Santoso, Meilanny Budiarti, dkk. (2017). Pergeseran Paradigma Dalam Disabilitas dalam *Intermestic: Journal of International Studies*, 1(2), 167.
- Saputra, Bagus Rachmad. (2019). Strategi Layanan Bimbingan Dan Konseling Dalam Meningkatkan Kesadaran Disabilitas Di Sekolah Inklusi dalam *Jurnal Bikotetik*, 3(2), 41.
- Setiowati, Arum, dkk. (2020). Strategi Layanan Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Dasar Untuk Mengatasi Perilaku Bullying dalam *Elementary School*, 7(2), 192-194.
- Schmidt, John J. (2008). *Counseling in Schools Comprehensive Programs of Responsive Service for All Student*. Boston : Pearson
- Subekti, L. P., Yuline, Y., & Astuti, I. (2012). Pelaksanaan Layanan Dasar Bimbingan dan Konseling Komprehensif di SMP Negeri 3 Pontianak. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK)*, 8(7), 250-259.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung:Alfabeta
- Sunaryo Kartadinata (2007). "Rambu-Rambu Penyelenggaraan Bimbingan Dan Konseling Dalam Jalur Pendidikan Formal"
- Susila. (2018). *Pelaksanaan Layanan Bimbingan Konseling pada Siswa SLB Sekota Banda Aceh*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
- Syafi'ie, M. (2014). Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas dalam *INKLUSI*, 1(2), 269-270.
- Syarief, N. S., an Pangestu, A., Putri, H. K., & Harjanti, G. Y. N. (2022). Karakteristik dan Model Pendidikan Bagi Anak Tuna Daksa. *Edification Journal: Pendidikan Agama Islam*, 4(2), 275-285.
- Thohari, Slamet. (2014). *Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi*

- Penyandang Disabilitas di Kota Malang dalam *Indonesian Journal of Disability Studies*, 1(1), 32.
- Widinarsih, Dini. (2019). Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Jilid 20, (2), 128.
- Winarno, S. (2009). Pendidikan Nasional: Strategi dan Tragedi. Buku Kompas
- Yusuf Muri. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: PT Fajar
- Yusuf, Syamsul. (2010). *Landasan Bimbingan*. Jakarta, Pustaka Setia